



**EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI ERA DIGITAL: STUDI
TERHADAP TRANSFORMASI DIGITALISASI FISKAL DI INDONESIA**

*Efficiency and Effectiveness of State Revenue Budget Planning in The Digital
Era: A Study of Fiscal Digitalization Transformation in Indonesia*

**M Iksan Muslimin¹, Inka Nusamuda Pratama^{*2}, Yeni Ardiani³, Siti
Rahmania⁴, Hayaulah Anjani⁵, Inang Sri Imara⁶, Ainul Jeriyah⁷, M
Samunawardin⁸, Imran, Marzuki⁹, Tiara¹⁰, Isdin¹¹**

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Universitas Muhammadiyah Mataram

***Email: inka.nusamuda@ummat.ac.id**

Abstract

Current developments in technology and information bring rapid and dramatic changes from traditional analog to digital in the digital era. Digitalization of information is the process of changing various analog formats to digital so that it can be easily created, stored, managed and distributed to users for various purposes and as a basis for decision making. The methodology used in assessing the efficiency and effectiveness of APBN planning in the digital era is through a literature review approach collect, analyze and integrate various relevant literature sources, both from journals, articles, books and previous research reports. The real result of digitalization is the reduction in time needed to prepare and allocate the national budget. The electronic budget system introduced by the Indonesian Ministry of Finance allows faster and more transparent budget allocation, thereby reducing the need for time-consuming manual procedures. Developing human resources, strengthening research and innovation, and developing systems and technology are important foundations for implementing digital transformation. Successful digital transformation requires people who are willing to change and learn to use digital products. In this regard, the Indonesian government has implemented various steps to increase digital literacy both at the government level and digital training for small and medium enterprises (SMEs).

Keywords: Digital Era, Viscal Innovation, APBN planning

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini membawa perubahan yang cepat dan dramatis dari yang tradisional analog menjadi digital di era digital. Digitalisasi informasi adalah proses perubahan berbagai informasi dari format analog ke digital sehingga dapat dengan mudah dibuat, disimpan, dikelola, dan didistribusikan kepada pengguna untuk berbagai keperluan dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Metodologi yang digunakan dalam kajian efisiensi dan efektivitas perencanaan APBN di era digital melalui pendekatan kajian literatur mengumpulkan, menganalisis dan mengintegrasikan berbagai sumber literatur yang relevan, baik dari jurnal, artikel, buku maupun laporan penelitian terdahulu. Hasil nyata dari digitalisasi adalah berkurangnya waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mengalokasikan anggaran nasional. Sistem anggaran elektronik yang diperkenalkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia memungkinkan alokasi anggaran lebih cepat dan transparan, sehingga mengurangi kebutuhan akan prosedur manual yang memakan waktu. Pengembangan sumber daya manusia, penguatan riset dan inovasi, serta pengembangan sistem dan teknologi menjadi landasan penting dalam penerapan transformasi digital. Transformasi digital yang sukses membutuhkan orang-orang yang

mau berubah dan belajar menggunakan produk digital. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk meningkatkan literasi digital baik di tingkat pemerintah maupun pelatihan digital bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Kata Kunci: *Era Digital, Inovasi Viskal, Perencanaan APBN*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini membawa perubahan yang cepat dan dramatis dari yang tradisional analog menjadi digital di era digital. Digitalisasi informasi adalah proses pengubahan berbagai informasi dari format analog ke digital sehingga dapat dengan mudah dibuat, disimpan, dikelola, dan didistribusikan kepada pengguna untuk berbagai keperluan dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemanfaatan sistem informasi pada perusahaan merupakan salah satu contoh digitalisasi transformasi informasi. Informasi yang digunakan dalam bisnis dikelola menggunakan komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Sistem informasi memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif (Miftahurrohman & Sukmawati, 2020).

Kehadiran teknologi komunikasi digital saat ini telah meningkatkan kinerja terbukti membawa inovasi yang signifikan. Mampu menjalankan fungsi pemasaran secara efektif dan efisien, memiliki jangkauan luas, dan menjadikan beragam konten hemat biaya dan interaktif, termasuk narasi, ilustrasi, dan video (Fitriansyah & Nuryakin, 2021). Administrasi bisnis telah menyadari perubahan digitalisasi. "Proses teknologi mengubah sinyal analog menjadi format digital" adalah salah satu fenomena paling relevan yang membentuk perkembangan dunia bisnis (Bergamaschi et al., 2021). Temuan Gilster dkk. (Fitriansyah & Nuryakin, 2021) mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kemampuan finansial dan digital, serta aspek non-kognitif seperti motivasi, keyakinan, dan aktivitas. kinerja keuangan memperkuat peran perantara keuangan seperti angel investor, investor ventura, dan kreditor dalam membantu mempromosikan kegiatan manajemen dan investasi perusahaan (Octavina & Rita, 2021).

Proses perencanaan yang sebelumnya sangat bergantung pada tenaga kerja manual kini beralih ke sistem berbasis digital yang memungkinkan transparansi, efisiensi, dan akurasi yang lebih baik. Seperti yang dijelaskan oleh Pratama dan Santosa (2022). "Pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan APEN memfasilitasi pengumpulan dan analisis data secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan, analisis informasi, dan pengembangan kebijakan yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat budgeting, e-Government, dan big data memungkinkan pemerintah merencanakan dan mengelola anggaran secara lebih akurat dan terintegrasi. Contoh penggunaan teknologi dalam perencanaan anggaran adalah diperkenalkannya sistem penganggaran elektronik. Hal ini memungkinkan lebih efisien dan transparan penganggaran dan membina kerjasama antar berbagai instansi pemerintah (Maharani, 2020). Hal ini sesuai dengan pandangan Kurniawan (2021). "Digitalisasi dalam perencanaan anggaran dapat mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan mempercepat proses evaluasi dan revisi anggaran," tegas laporan itu.

Namun, transformasi digital ini juga memerlukan adaptasi di berbagai level, baik dari segi infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, maupun regulasi yang mendukung. Dalam konteks ini, perencanaan APBN untuk era digital tidak hanya tentang penggunaan teknologi tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan akuntabilitas, partisipasi publik, dan kontrol dalam proses penganggaran pemerintah. Menurut Bappenas (2021), digitalisasi perencanaan anggaran dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Misalnya saja penerapan sistem e-government dalam APBN akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas (Arwani & Priyadi, 2024).

Dengan memanfaatkan potensi digitalisasi, Rencana APBN dapat lebih merespon dinamika ekonomi yang berubah dengan cepat dan meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk mengelola APBN dengan lebih baik dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, pemahaman tentang digitalisasi dalam perencanaan anggaran menjadi hal yang penting. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Memberikan sejumlah manfaat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan teknologi, khususnya di era digital. APBN akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun sistem ekonomi, sosial, pusat data, dan komunikasi yang membentuk fondasi ekonomi digital. Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan di suatu daerah (Pratama & Subandi, 2023).

Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Era Digital (APBN) mencakup beberapa aspek penting terkait pemanfaatan teknologi dan inovasi digital. APBN juga akan digunakan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur digital, seperti jaringan internet, pusat data, dan sistem komunikasi yang mendukung operasi pemerintahan dan masyarakat. Dukungan APBN akan memungkinkan pemerintah untuk mendigitalkan layanan publik dan mempermudah, mempercepat, dan efisiensi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan melalui platform online. Perkembangan Ekonomi Digital : APBN memungkinkan pemerintah mendanai proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital, seperti startup teknologi, inovasi digital, dan pengembangan ekosistem startup yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Sistem digital harus terus dikembangkan untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam New Public Governance (NPG), aspek kepuasan publik harus menjadi fokus perhatian dengan meningkatkan kualitas layanan. Ini berarti pengelolaan website dan portal milik pemerintah daerah harus diperbaiki dan data yang ditampilkan atau diberikan harus valid. Sama seperti (Negara et al., 2020).

Beralih dari e-government ke digital government memerlukan identifikasi inisiatif yang diperlukan untuk membuat perubahan yang lebih dalam dalam penyediaan layanan online melalui portal pemerintah untuk mencakup bisnis pemerintah yang lebih luas. Sistem berbasis teknologi baru yang "diubah" tidak hanya harus berorientasi pada strategi, ramah konsumen, dan mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi mereka yang berinteraksi dengan pemerintah; yang lebih penting, mereka juga harus meningkatkan cara pemerintah bertindak (Setyasih, 2022).

Digitalisasi memiliki banyak keuntungan, namun permasalahan terbesar bagi pemerintah Indonesia adalah kesenjangan antara infrastruktur yang menghambat optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran nasional dan sumber daya manusia. Informasi keuangan berbasis digital akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN serta memungkinkan masyarakat lebih mudah memantau alokasi dan pelaksanaan anggaran. Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan anggaran nasional membawa efisiensi yang signifikan, termasuk pengurangan biaya administrasi, pemrosesan data yang lebih cepat, dan transparansi penggunaan anggaran publik” (Sudirman et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan tinjauan literature sistematis untuk menganalisis temuan terkait efisiensi dan efektivitas perencanaan APBN di era digital di Indonesia. Pertanyaan survei yang digunakan adalah Peran apa yang dimainkan APBN dalam perencanaan APBN di era digital? Kriteria inklusi meliputi artikel dari jurnal ilmiah ternama seperti Scopus, Web of Science, dan Sinta. Diterbitkan dalam bahasa Inggris atau Indonesia antara tahun 2019 hingga 2024, membahas tentang peran pemerintah dalam perencanaan APBN di era digital Indonesia (Prayoga et al., 2023). Penjelasan metode penelitian sistem tinjauan pustaka. Kriteria eksklusi meliputi publikasi non-ilmiah, makalah tanpa akses penuh, makalah yang tidak terkait dengan pertanyaan penelitian atau dengan metodologi yang tidak jelas. Penelusuran dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan menggunakan kata kunci sebagai berikut: Rencana APBN Era Digital di Indonesia dan Strategi Pemerintah untuk Mengatasi dan Melaksanakan Permasalahan Terkait (Rosi & Risma, 2024).



Gambar 1. Teknik dalam mengumpulkan dan membedah informasi (Sumber Literatur Review: Zainudin Zuhri, ST.,MIT)

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah tinjauan literatur sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis literatur terkait Perencanaan APBN di era digital di Indonesia. Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi sumber data dari jurnal akademis, laporan pemerintah seperti Kementerian Keuangan (kemenkeu), Kementerian perencanaan pembangunan nasional (Bappenas), dan Kementerian PANRB, dokumen APBN, serta Mentri/Pimpinan Lembaga Selaku Pengguna Anggaran dan Bagian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). penelitian ini mengkaji alokasi anggaran APBN,

perencanaan APBN di era digital di Indonesia, serta berisi mengenai rencana belanja tahunan bagi negara untuk tahun kedepan (Rosi & Risma, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi rencana APBN telah meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara. Sistem berbasis teknologi informasi membuat proses pengumpulan data, perencanaan, alokasi, dan pemantauan anggaran menjadi lebih cepat dan otomatis. Dengan menerapkan teknologi seperti Enterprise Resource Planning (ERP) dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Nasional (SIMAK), otoritas keuangan dapat menyiapkan dan mengelola anggaran secara lebih terintegrasi. Hal ini mengurangi duplikasi upaya dan meminimalkan potensi kesalahan manusia. Transformasi digital Kementerian Keuangan bertujuan untuk menggabungkan berbagai inisiatif strategi transformasi ke dalam konteks yang lebih kontemporer dengan menggunakan teknologi digital (Manik & Juwono, 2024).

Hasil nyata dari digitalisasi adalah berkurangnya waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mengalokasikan anggaran nasional. Sistem anggaran elektronik yang diperkenalkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia memungkinkan alokasi anggaran lebih cepat dan transparan, sehingga mengurangi kebutuhan akan prosedur manual yang memakan waktu. Teknologi ini juga memudahkan untuk mengubah anggaran bila diperlukan, seperti pada saat krisis ekonomi atau keadaan darurat. Sistem anggaran elektronik di Indonesia memungkinkan setiap kementerian dan lembaga menyampaikan usulan anggaran secara elektronik, yang kemudian secara otomatis diproses oleh sistem dan disesuaikan dengan anggaran nasional.

Penggunaan e-budgeting di Kementerian Keuangan dapat memberikan dampak positif, seperti: Pengaruh Digitalisasi terhadap Transparansi Sistem digital memungkinkan pelaporan belanja negara secara real-time dan terbuka. Hal ini membuat masyarakat dan lembaga pengawas dapat mengawasi proses belanja dengan lebih ketat. Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya belanja negara, memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan transparansi. Transparansi, sebagai salah satu prinsip utama good governance, mencakup aksesibilitas informasi bagi publik dan pemangku kepentingan terkait proses dan hasil pengelolaan keuangan negara. Sistem informasi berbasis digital memungkinkan pelaporan belanja negara secara real-time dan lebih terbuka. Di Indonesia, misalnya, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) digunakan untuk memantau alokasi dan realisasi belanja. Kedua sistem ini menyediakan data yang dapat diakses oleh instansi terkait dan memungkinkan publik untuk mengetahui bagaimana dana APBN dialokasikan dan digunakan. Data yang tersedia secara digital juga mempermudah pemerintah untuk melacak potensi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Dengan adanya transparansi yang lebih besar, masyarakat dan lembaga pengawas dapat mengawasi proses belanja secara lebih ketat, mendorong pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel. Melalui digitalisasi, penyimpangan anggaran dapat lebih cepat terdeteksi, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara (Benny & Supriyanto).

Transformasi digital memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan big data dalam pengelolaan belanja negara. Big data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang dapat dianalisis untuk menemukan pola dan tren yang relevan dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks realisasi belanja negara, big data digunakan untuk memprediksi kebutuhan anggaran, mengidentifikasi area yang membutuhkan pengeluaran lebih besar, serta memantau dampak belanja terhadap program-program pemerintah. Penggunaan big data juga memungkinkan akurasi yang lebih tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja. Misalnya, analisis data dapat membantu pemerintah memprediksi pengeluaran yang tepat berdasarkan tren ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini mengurangi risiko over-budgeting atau under-budgeting yang dapat menghambat pencapaian program pemerintah. Selain itu, big data juga mempermudah pemerintah untuk melakukan evaluasi kinerja belanja. Data yang dihasilkan dari berbagai program dapat diolah untuk mengukur efektivitas belanja terhadap target output dan outcome yang diharapkan. Dengan demikian, big data membantu pemerintah untuk melakukan pengambilan keputusan berbasis bukti, sehingga belanja negara menjadi lebih efisien dan tepat sasaran (Pratama et al., 2024).

Analisis Komparatif Penerapan Digitalisasi Fiskal di Negara Lain Digitalisasi fiskal, yang meliputi penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan negara, telah menjadi tren global. Banyak negara telah menerapkan berbagai bentuk digitalisasi fiskal untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka. Berikut adalah analisis komparatif terhadap beberapa negara yang telah sukses menerapkan digitalisasi fiskal:

Singapura: Model Digitalisasi Fiskal yang Komprehensif

Singapura dikenal sebagai negara dengan sistem digitalisasi fiskal yang komprehensif. Singapura telah menerapkan sistem pajak elektronik yang terintegrasi, memungkinkan wajib pajak untuk melapor pajak, membayar pajak, dan mengakses informasi pajak secara online. Sistem ini telah berhasil meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak.

India: Meningkatkan Akses dan Transparansi

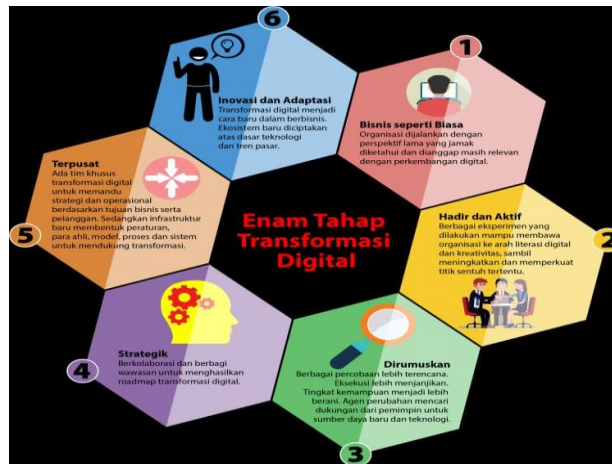
India telah menerapkan berbagai program digitalisasi fiskal untuk meningkatkan akses dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. - India telah menerapkan sistem Goods and Services Tax (GST) Network yang terintegrasi, memungkinkan wajib pajak untuk melapor pajak dan membayar pajak secara online. Sistem ini telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Gambar 1.1 mengilustrasikan kenaikan pajak dari tahun ke tahun.



Gambar. 2. Siklus kenaikan pajak (Sumber: Sri Mulyani Indrawati)

Dalam penerapan digitalisasi, Indonesia sedang mengembangkan platform seperti pemantauan elektronik yang dapat memantau pelaksanaan anggaran dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan sesuai rencana. Misalnya, infrastruktur dan pendidikan, yang sering menerima investasi anggaran besar, memerlukan pemantauan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif. Pemerintah menyusun APBN setiap tahun. Dasar hukum dan tata cara pembentukan APBN. Setelah APBN menjadi undang-undang, pelaksanaannya akan dijelaskan lebih rinci dengan Peraturan Presiden. Karena perkembangannya, revisi/perubahan APBN dapat terjadi di tengah tahun anggaran. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus menyerahkan rancangan perubahan APBN untuk mendapat persetujuan DPR. Kota Mataram juga telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui berbagai forum seperti Rapat Perencanaan Pembangunan (Muslembang) dan dengar pendapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Kota Mataram juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penganggaran partisipatif (PPA), yaitu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan kota (Pratama & Subandi, 2023).

Stabilitas ekonomi merupakan syarat pokok bagi pelaku ekonomi. Jadi kita butuh lebih banyak pertumbuhan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tahun lalu dinilai masih lebih lambat dibandingkan sebelum krisis. Pertumbuhan tersebut masih ditopang oleh kontribusi konsumsi yang relatif tinggi, sementara dukungan terhadap sumber ekonomi produktif seperti investasi dan ekspor masih perlu dioptimalkan. Efisiensi anggaran adalah pelaksanaan kerja dan kegiatan yang memerlukan biaya. Ini adalah cara menghitung tingkat efisiensi biaya dengan menggunakan anggaran belanja dan memberikan prioritas pada faktor-faktor input yang berkaitan dengan pencapaian tujuan (Maumere, 2024).



Gambar 3. Tahapan transformasi digital (Sumber: Indonesia cyber security forum (ICSF))

Mengapa harus bertransformasi digital?

Tidak perlu takut dengan berbagai perubahan. Pada kenyataannya, digitalisasi tidak selalu berarti buruk. Bukan sesuatu yang baru, apalagi istimewa. Banyak studi kasus menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesuksesan positif dengan menggunakan saluran digital sebagai bagian dari strategi komunikasi mereka. Dari segi efisiensi, efektivitas, akseptabilitas, pencapaian tujuan bahkan kelangsungan usaha. Menerapkan alat pendengar media sosial membantu Anda mengidentifikasi potensi masalah terkait merek Anda, merespons dengan cepat dan tepat untuk mencegah masalah tersebut menjadi berbahaya, memantau penyebutan merek Anda, dan mengukur sentimen sosial terhadap merek Anda. Dalam era revolusi industri 5.0 saat ini, teknologi informasi telah berkembang dengan cepat sehingga orang dapat dengan cepat mendapatkan informasi. Kemajuan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis. Saat ini, hampir semua aktivitas bisnis dilakukan secara digital (Anshari & Manjaleni, 2024).

Transformasi digital memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih cepat dan lebih otomatis. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga kini dapat dipercepat dengan menggunakan sistem digital. Sistem seperti penganggaran elektronik dan aplikasi berbasis cloud memungkinkan lembaga untuk mengoordinasikan perencanaan dan alokasi anggaran secara lebih efisien, mengurangi redundansi dan meningkatkan akurasi. Belanja selalu naik pada efisiensi umum. Alasan kenaikan ini biasanya disebabkan oleh perubahan inflasi, kurs rupiah, dan faktor makro ekonomi lainnya. Namun demikian, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengontrol belanja negara, melakukan efisiensi belanja, dan melakukan penghematan anggaran (Putri Darma et al., 2024).



Gambar 4. Transformasi digital (Sumber: Webinar OJK)

Sesuai dengan Roadmap Literasi Digital, transformasi digital dapat terjadi dalam beberapa tahapan, yang terjadi secara bersamaan dan saling mendukung. Pertama, metode pemasaran digital memfasilitasi pemasaran digital, komunikasi informasi produk dan penyederhanaan transaksi. Selain itu, fleksibilitas dalam penggunaan perangkat dan teknologi seluler dan adaptif juga mendukung transformasi digital. Fokus transformasi digital adalah meningkatkan kepuasan dan pengalaman dalam mengonsumsi produk atau menggunakan layanan, meningkatkan level pelanggan. Efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, kecepatan dan keakuratan proses bisnis juga menjadi tujuan penerapan transformasi digital. Pada akhirnya, transformasi digital menjadikan informasi lebih mudah diakses oleh pelanggan dan organisasi. Memang, publikasi sangat penting bagi pelayanan publik, tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang bermanfaat, baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik maupun pedoman yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. memenuhi hak warga negara. (Pratama & Subandi, 2023).

Pengembangan lebih lanjut sumber daya manusia (SDM), penguatan riset dan inovasi, serta pengembangan sistem dan teknologi menjadi landasan penting dalam penerapan transformasi digital. Transformasi digital yang sukses membutuhkan orang-orang yang mau berubah dan belajar menggunakan produk digital. Pemerintah Indonesia menyadari hal ini dan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan literasi digital baik di tingkat pemerintah maupun melalui berbagai kursus pelatihan digital bagi UMKM. Peningkatan penelitian dan inovasi, khususnya di bidang digital, memberikan landasan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan sistem dan infrastruktur yang mendukung perkembangan teknologi. Fleksibilitas untuk menerima dan beradaptasi terhadap perubahan sangat penting bagi keberhasilan transformasi digital. Transformasi digital pasar modal adalah satu-satunya solusi untuk menjaga pasar modal tetap berfungsi. Melakukan transaksi pasar modal secara digital meminimalkan pertemuan tatap muka dan dinilai aman selama dan setelah pandemi. Menurut situs datareportal.com (2022), jumlah pengguna internet di Indonesia per Januari 2022 berjumlah 444 juta orang, dan diperkirakan akan mencapai 204,7 juta atau sekitar 73% dari total penduduk Indonesia pada pertengahan tahun ini. Dikatakan juga bahwa dari total jumlah pengguna internet, 941D44 menggunakan internet melalui telepon genggamnya. Jumlah transaksi online yang meningkat selama pandemi tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat, yang ditandai dengan hadirnya layanan internet dengan kecepatan tinggi serta tren meningkatnya

penggunaan ponsel pintar di kalangan masyarakat Indonesia. Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ledakan perubahan mengerikan ini (Raharjo, 2022).

KESIMPULAN

Pengembangan sumber daya manusia, penguatan riset dan inovasi, serta pengembangan sistem dan teknologi menjadi landasan penting dalam penerapan transformasi digital. Transformasi digital yang sukses membutuhkan orang-orang yang mau berubah dan belajar menggunakan produk digital. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk meningkatkan literasi digital baik di tingkat pemerintah maupun pelatihan digital bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan memperkuat penelitian dan inovasi, khususnya di sektor digital, pemerintah dapat meletakkan dasar bagi perbaikan lebih lanjut infrastruktur yang mendukung pengembangan sistem dan teknologi. Fleksibilitas untuk menerima dan beradaptasi terhadap perubahan sangat penting bagi keberhasilan transformasi digital. Transformasi digital pasar modal adalah satu-satunya solusi untuk menjaga pasar modal tetap berfungsi. Melakukan transaksi pasar modal secara digital meminimalkan pertemuan tatap muka dan dinilai aman selama dan setelah pandemi. Menurut situs datareportal.com (2022), jumlah pengguna internet di Indonesia per Januari 2022 berjumlah 4.444 orang, dan diperkirakan akan mencapai 204,7 juta atau sekitar 73% dari total penduduk Indonesia pada pertengahan tahun ini diharapkan. Disebutkan juga bahwa dari total jumlah pengguna internet, 94.1D44 menggunakan internet melalui telepon genggamnya.

Namun, meskipun manfaat digitalisasi sangat besar, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam penerapannya. Keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah dan rendahnya keterampilan staf yang bekerja dengan sistem digital merupakan hambatan utama dalam adopsi teknologi secara keseluruhan. Selain itu, perbedaan teknis antara daerah dan pusat juga dapat menghambat pemerataan manfaat digitalisasi fiskal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia di seluruh Indonesia untuk memastikan penerapan sistem digital yang lebih seragam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana transformasi digital dapat memperbaiki sistem fiskal Indonesia, baik dari sisi efektivitas, efisiensi, maupun dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, transformasi digitalisasi keuangan di Indonesia secara keseluruhan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rencana APBN. Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintah perlu lebih memperkuat sistem digitalisasi, meningkatkan pelatihan sumber daya manusia yang relevan, dan menjembatani kesenjangan teknologi antara pusat dan daerah. Hal ini akan memastikan bahwa digitalisasi keuangan mempunyai dampak positif yang maksimal terhadap pengelolaan anggaran nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M. I., & Manjaleni, R. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Proses Akuntansi Pada Koperasi Pesantren. *Journal of Economics and Accounting*, 5(1), 51–58. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v5i1.2036>
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam



- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 23–37. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.653>
- Benny, O., & Supriyanto, E. (n.d.). *Pemberantasan Korupsi: Upaya untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*.
- Manik, S. P., & Juwono, V. (2024). Strategi Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Studi pada Kementerian Keuangan. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.28926/briliant.v9i1.1623>
- Maumere, T. C. H. (2024). *Belanja Berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja*. 3, 88–100.
- Miftahurrohman, & Sukmawati, F. (2020). Digitalisasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan dengan Metode Accrual Basis pada Klinik As Shifa Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi*, 13(1), 47–62.
- Negara, J. A., Ilmu, F., & Dan, S. (2020). Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government) I Gede Agus Wibawa dan Lilik Antarini. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 57–71.
- Octavina, L. A., & Rita, M. R. (2021). Digitalisasi umkm, literasi keuangan, dan kinerja keuangan : Studi pada masa pandemi Covid-19. *STIE Perbanas Press 2021*, 11, 73–92. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2552>
- Pratama, I. N., Darmansyah, Subandi, A., & Ibrahim, A. H. (2024). Public Communication Strategies in Sustainable Development Goals. *Jurnal Public Policy*, 10(1), 61–68. <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/7409/pdf>
- Pratama, I. N., & Subandi, A. (2023). Transformasi Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Mataram. *Seminar Nasional II LPPM Ummat 2023*, 2(April), 1-13.
- Prayoga, D. A., Hadi, A., & Pratama, I. N. (2023). Modal Sosial Mukti Dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Desa Dua Periode Di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 19–32.
- Putri Darma, S., Haliza, N., Aulia Br Ginting, D., & Kemala, P. (2024). Analisis Efisiensi dan Transparansi APBN Indonesia: Studi Kasus Tahun Terbaru. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2506–2512. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1101>
- Raharjo, R. (2022). Analisis Implementasi Marketplace dan Digital Payment pada Belanja APBN untuk Memberdayakan UMKM. *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 27–46. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i3.86>
- Rosi, N., & Risma, K. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Dalam Pengelolaan Apbn Di Indonesia. *Analisis Kebijakan Fiskal*, 54, 1–13.
- Setyasih, E. T. (2022). Transformasi Digital Pemerintah Daerah Di Era Society 5.0: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(3), 59–66. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i3.657>

